

[Type here]

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab satu akan dibahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Partai UKIP (*United Kingdom Independence Party*) merupakan partai yang didirikan pada bulan September 1993, partai ini didirikan oleh seseorang yang anti terhadap Uni Eropa yaitu bernama Alan Sked, pada tahun 2016 Partai UKIP di pimpin oleh Nigel Farage, dimana sebelum memimpin Partai UKIP Nigel Farage pernah berkarir di Partai Konservatif sebelum dia memutuskan berpindah haluan ke Partai UKIP, latar belakang berdirinya partai ini tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat Inggris terhadap Uni Eropa, yang pada akhirnya masyarakat Inggris yang merasa kecewa tersebut atau biasa di sebut dengan kelompok *eurosceptic* mendirikan partai ini, partai ini bukanlah partai superior di wilayah Inggris dan termasuk dalam golongan partai baru karena partai ini baru berusia sekitar 23 tahun, akan tetapi secara perlahan partai ini mampu memberikan pengaruhnya didalam perpolitikan Inggris.

Partai UKIP adalah satu-satunya partai di Inggris yang terang-terangan menentang keanggotaan Inggris di dalam Uni Eropa dan menginginkan agar Inggris keluar dari keanggoan Uni Eropa, selama ini dalam panggung perpolitikan Inggris dikuasai oleh tiga partai yatu Partai Konservatif, Partai Buruh dan Partai Liberal

[Type here]

Demokrat, pemerintahan Inggris pada saat ini merupakan koalisi antara Konservatif dan Liberal Demokratik (DW, 2014). Namun beberapa tahun terakhir Partai UKIP mampu menjadi kuda hitam dalam kancah perpolitikan Inggris dan terus mengalami peningkatan dukungan dari masyarakat Inggris, oleh karenanya penulis tertarik untuk menjadikan Partai UKIP sebagai subjek dalam karya tulis ini.

Awal mula hubungan kawasan Eropa dengan Inggris bermula ketika kebijakan luar negeri Inggris memutuskan agar Inggris bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada tahun 1973. Pada tahun tersebut terjadi krisis minyak yang berakibat pada lambatnya laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Inggris, dengan memutuskan untuk bergabung dengan MEE harapannya dapat meningkatkan dan memperbaiki keadaan ekonomi Inggris. Kerjasama di kawasan Eropa berawal dari kerjasama 6 negara yaitu Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, Luxemburg dan Italy atau biasa disebut *The Inner Six* dalam sektor batubara dan baja pada tahun 1951, kemudian pada tahun 1957 terbentuklah *European Economic Community* (EEC) dengan tujuan agar adanya penghapusan *Import Quota* dan hambatan perdagangan lainnya sesama negara anggota. Pada akhirnya integrasi di kawasan Eropa terus berkembang dan menjadi satu dalam *European Union* (EU) pada tahun 1993 dengan tujuan terbentuknya *Economic Union* (Nugraha, 2012).

Pada tahun 1992 dalam perjanjian Maastricht mengharuskan negara- negara anggota Uni Eropa menggunakan mata uang bersama dan pada tahun 1999 baru diperkenalkan bahwa *Euro* menjadi mata uang bersama kawasan Eropa, akan tetapi Uni Eropa masih memberlakukan diferensiasi terhadap proses integrasi Uni Eropa, salah satunya adalah dalam hal mata uang, dimana Inggris menginginkan tetap

[Type here]

bertahan menggunakan mata uang negaranya yaitu *poundsterling*, Inggris menolak *Eurozone* karena Inggris tidak ingin terikat hanya dengan satu benua saja, akan tetapi Inggris ingin melebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia, selain itu Inggris juga percaya bahwa *Poundsterling* akan menjadi mata uang terkuat dunia yang bisa bertahan terhadap guncangan krisis ekonomi dan moneter di kawasan Eropa (Nugraha, 2005). Selain itu, dalam masa pemerintahan David Cameron Inggris juga menentang salah satu kebijakan Uni Eropa yaitu kebijakan *Free Movement of Workers* kebijakan ini mengenai kebebasan pergerakan tenaga kerja negara anggota Uni Eropa untuk mendapatkan pekerjaan di negara anggota Uni Eropa lainnya. Kebijakan ini mengakibatkan perpindahan individu besar- besaran dari negara miskin ke negara yang lebih kaya, Inggris merupakan salah satu negara kawasan Industri terbesar di kawasal Eropa dan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak, sehingga banyak para tenaga kerja dari negara lain yang bermigrasi ke Inggris untuk mencari pekerjaan, pada tahun 2014 jumlah warga negara anggota Uni Eropa di Inggris sebanyak 2.623 ribu jiwa (eurostat, 2014).

Dalam perkembangan Uni Eropa, Inggris adalah salah satu kontributor besar dalam menjalankan roda organisasi Uni Eropa, salah satunya yaitu Inggris merupakan sumber pendanaan Uni Eropa terbesar ke empat setelah Jerman, Prancis dan Italy. Pada tahun 2015 Inggris memberikan kontribusi pendanaan sebesar 18,20 miliar euro dari total anggaran 118,60 miliar euro (sindonews, 2017). Partai UKIP menginginkan agar keanggotaan Inggris di Uni Eropa di evaluasi secara mendalam, karena melihat keuntungan yang di dapatkan Inggris dari Uni Eropa selama menjadi

[Type here]

bagian dari anggota, dinilai tidak sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan Inggris kepada Uni Eropa selama ini.

Pada tahun 2016 Inggris Raya telah melaksanakan referendum untuk menentukan nasibnya dalam keanggotaan Uni Eropa, apakah Inggris akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa atau Inggris akan menetap sebagai anggota Uni Eropa. Dalam referendum yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016, telah memberikan hasil bahwa mayoritas pemilih di Inggris menginginkan agar Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Hasil dari referendum Inggris ini sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah Inggris dalam menentukan keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

Pelaksanaan referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa berawal dari pidato Perdana Menteri David Cameron terkait masa depan Inggris di Uni Eropa pada tanggal 23 Januari 2013. Dalam pidatonya Perdana Menteri David Cameron menilai sangat penting untuk melakukan renegotiasi keanggotaan Inggris di Uni Eropa, karena rasa frustrasi masyarakat umum terhadap Uni Eropa mencapai puncaknya pada saat ini (DW, 2013). Selain itu, pada masa kampanye menjelang pemilihan Mei 2015 Perdana Menteri David Cameron juga mengatakan, berencana akan menggelar referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa apabila dirinya terpilih lagi dalam masa jabatan kedua dan pada akhirnya pemilu pada bulan Mei 2015 dimenangkan kembali oleh David Cameron yang diusung oleh Partai Konservatif, fokus utama Perdana Menteri David Cameron setelah terpilih kembali adalah melaksanakan janji kampanyenya untuk melaksanakan referendum Uni Eropa, setelah melakukan renegotiasi dengan Brussel akhirnya ditentukan waktu

[Type here]

pelaksanaan referendum yaitu pada 23 Juni 2016. Penentuan waktu ini ditetapkan setelah Parlemen Inggris melakukan perdebatan yang cukup lama terkait RUU referendum ini, pada akhirnya parlemen melakukan pemungutan suara dimana dalam proses ini, sebanyak 544 orang mendukung pembuatan RUU Referendum dan 53 orang menolaknya, Partai Konservatif dan Buruh mendukung RUU sedangkan Partai Nasional Skotlandia menolaknya (BBC, 2015).

Dalam proses ini tidak dapat dipungkiri bahwa Partai Politik di Inggris memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menyikapi isu *Brexit*. Partai- partai politik di Inggris terpecah ke dalam dua kubu tersebut, anggota dua partai utama di Inggris yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif memiliki perbedaan pandangan seputar *Brexit*, namun para pemimpin mereka tetap menekankan agar Inggris tetap bergabung dalam Uni Eropa. Sementara sebagian petinggi kedua partai tersebut lebih memilih keluar dari blok Eropa (ParsToday, 2016).

Partai UKIP sebagai partai minoritas di Inggris yang secara terang-terangan mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa, seyogyanya dalam mengambil kebijakan tersebut Partai UKIP memiliki pertimbangannya tersendiri, dengan mendukung *Brexit* tentunya ada resiko yang akan diterima oleh partai, meskipun isu *Brexit* telah menjadikan Partai UKIP sebagai partai yang paling diperbincangkan oleh masyarakat Inggris, namun hal ini juga bisa membuat munculnya sikap resisten dari masyarakat Inggris terhadap Partai UKIP, hal ini dikarenakan sikap Partai UKIP yang mendukung *Brexit* dinilai sebagai keputusan yang tergesa-gesa dan tidak seimbang, bahkan menurut mantan Perdana Menteri John Major sikap tersebut merupakan menjual kebohongan rasional (Sidiq, 2016).

[Type here]

Dalam sebuah penelitian mencatat Inggris akan mengalami kerugian apabila keluar dari keanggotaan Uni Eropa, hasil penelitian ini menjadi pukulan bagi kubu Pro *Brexit*, menurut riset Konfederasi Bisnis Inggris (CBI) yang dirilis pada akhir maret 2016, *Brexit* akan berdampak serius pada perekonomian Inggris dan mereka akan kehilangan sekitar 100 miliar pound. Produk Domestik Bruto Inggris akan turun sekitar 5 persen dan kehilangan 950 ribu lapangan pekerjaan (ParsToday, 2016). Dalam perdebatan ini Partai UKIP merupakan partai terdepan yang mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa, meskipun hasil penelitian menyimpulkan bahwa Inggris akan mengalami kerugian apabila keluar dari Uni Eropa dan partai-partai besar lainnya menginginkan agar Inggris tetap bertahan dalam Uni Eropa, namun Partai UKIP tetap menuntut agar Inggris segera keluar dari keanggotaan uni Eropa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah terjadi diatas, maka penulis ingin menganalisis tentang “*Mengapa Partai UKIP menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa dalam Referendum Inggris 2016?* ”

## **C. Kerangka Teori**

Dalam menjawab permasalahan diatas penulis akan akan menggunakan teori voting behavior dan teori realisme. Teori voting behavior digunakan untuk menganalisa kepentingan politik Partai UKIP dalam menolak keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada referendum Inggris 2016 dan teori realisme digunakan untuk menjelaskan pandangan Partai UKIP terhadap keanggotaan Inggris di Uni Eropa .

[Type here]

Penggunaan teori ini diharapkan mampu membantu penulis dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

### **1. Teori Voting Behavior**

Menurut Ramlan Surbakti *voting behavior* atau perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih didalam suatu pemilihan umum. Bila pemilih memutuskan untuk memilih maka pemilih akan memilih atau mendukung kandidat tertentu (Surbakti, 1997). Pemberian suara kepada salah satu kontestan atau partai politik merupakan suatu kepercayaan untuk menyampaikan aspirasi pribadi, dalam memberikan kepercayaan tersebut tentunya ada pertimbangan aspek kesamaan nilai dalam mencapai sebuah tujuan. Kepercayaan pemilih akan ada apabila pemilih tersebut sudah memahami makna nilai yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dalam membangun *image* politik, partai politik memerlukan sebuah komunikasi politik yang baik. Komunikasi politik yang dimaksud adalah semua hal yang dilakukan oleh partai politik untuk mentransfer sekaligus menerima umpan balik tentang isu-isu politik berdasarkan semua aktivitasnya yang dilakukan terhadap masyarakat. Isu politik tersebut dapat berupa ideologi partai, program kerja partai, figur pemimpin partai, visi jangka panjang partai dan permasalahan-permasalahan yang diungkapkannya (Firmanzah,2008). Bagi partai politik fokus terhadap isu tertentu sangat penting untuk membangun *image* partai, karena isu tersebut akan mempengaruhi perilaku pemilih untuk memberikan kepercayaannya

[Type here]

kepada partai yang memiliki kesamaan nilai dalam melihat suatu tujuan atau permasalahan.

Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih, Andrew Heywood dalam bukunya berjudul *politics* mengelompokan perilaku pemilih kedalam empat model yaitu, pertama model sosiologis, model identifikasi partai, model pilihan rasional dan model ideologi dominan.

Model sosiologi pada awalnya dikembangkan oleh Berelson, Lazarsfeld, dan McPhee (1954) dari Columbia University, kemudian dikembangkan lagi oleh lipset dan Rokkan (1967). Model ini mempercayai bahwa perilaku memilih seseorang ditentukan oleh latar belakang dan karakter sosiologinya seperti agama, kelas, bahasa, ras dan daerah tempat tinggalnya. Model sosiologi menunjukkan bahwa pemilih cenderung mengadopsi pola voting yang mencerminkan posisi ekonomi dan sosial dari kelompok mana mereka berasal.

Model identifikasi partai atau model sosial-psikologis memiliki pandangan bahwa preferensi politik seseorang dalam memilih bukan hanya ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Rasa kedekatan dan kepercayaan terhadap partai tertentu sangat menentukan pilhan pemilih dalam suatu pemilihan umum. Partisipasi dalam suatu pemilihan merupakan manifestasi keberpihakan, bukan produk dari perhitungan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan, kepribadian, kampanye dan liputan media (Heywood, 2007).

Model pilihan rasional memiliki pandangan bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh penilaian terhadap keadaan ekonomi, sosial dan politik di tingkat

[Type here]

individu dan di tingkat lokal, regional dan nasional. Dalam pandangan model ini, voting dianggap sebagai tindakan yang rasional, artinya bahwa perilaku pemilih diyakini memutuskan pilihan partai mereka atas dasar kepentingan pribadi. Para pemilih berperilaku seperti konsumen mengekspresikan pilihan antara pilihan kebijakan yang tersedia (Heywood, 2007). Pendekatan ini memberikan gambaran bahwa suara partai sangat penting untuk mengolah suatu isu dan program kebijakan yang dianggap rasional oleh para calon pemilih, dimana nantinya akan disosialisasikan kepada para pemilih untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka.

Model ideologi dominan percaya bahwa proses manipulasi dan kontrol ideologi akan sangat mempengaruhi preferensi pemilih dalam pemilihan umum (Heywood, 2007). Para pemilih akan cenderung memilih partai ataupun kandidat yang memiliki kesamaan ideologi, dalam membangun *image* politik banyak partai yang membangun basis masa berdasarkan latar belakang kesamaan keyakinan atau ideologi. Peran pendidikan dan media massa sangat penting dalam proses menanamkan ideologi partai kepada para pemilih.

Untuk menunjang penelitian ini penulis hanya akan menggunakan dua model saja untuk menganalisa alasan Partai UKIP menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa dalam referendum Inggris 2016, yaitu pertama model pilihan rasional dan yang kedua model ideologi dominan.

Partai UKIP yang merupakan partai anti Uni Eropa, dalam membangun opini publik terkait *Brexit*, partai ini berusaha membangun opini dengan gagasan nasionalisme dan rasional artinya berorientasi pada kedaulatan dan kepentingan nasional Inggris selain itu opini yang dibangun merupakan gagasan-gagasan yang

[Type here]

rasional, opini publik yang berusaha dibangun partai ini merupakan salah satu instrument agenda politik Partai UKIP, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Inggris terhadap Partai UKIP. Menjelang pemilu parlemen Eropa 2014 Partai UKIP berkampanye menggunakan slogan-slogan anti imigran, di mana banyaknya imigran yang masuk pada wilayah Inggris akan mengganggu kepentingan nasional Inggris untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Inggris, hal ini bertujuan untuk menjaring dukungan dari masyarakat Inggris yang kecewa terhadap Uni Eropa (DW, 2014). Partai UKIP berusaha mempengaruhi perilaku pemilih menggunakan model pilihan rasional dengan mengagaskan isu-isu politik yang dianggap rasional oleh para pemilih dan model ideologi dominan dengan mengedepankan prinsip ideologi partai untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilih yang memiliki kesamaan ideologi.

## 2. Teori Realisme

Teori realisme merupakan salah satu teori klasik untuk mendeskripsikan fenomena- fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional, dalam perkembangan teori realis, *power* merupakan instrument utama sebuah negara dalam menjalankan proses interaksi dengan dunia internasional. Teori ini tidak hanya berbicara mengenai sistem internasional saja, akan tetapi teori realisme juga memiliki pandangan sendiri dalam melihat institusi internasional atau organisasi internasional.

Dalam memandang sistem internasional, pendekatan realis memiliki lima asumsi dasar yang ditulis oleh **John J Mearsheimer** (1995) di dalam karyanya berjudul *False Promise Of international Institutions* yaitu, Pertama adalah

[Type here]

menyebutkan bahwa sistem internasional bersifat anarki, dimana dalam sistem anarki ini tidak ada pemerintahan lainnya di atas sebuah pemerintahan, jadi negara merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, dan aktor utama dalam hubungan internasional adalah negara. Kedua adalah negara memiliki kapasitas untuk membangun kekuatan militernya, hal ini dapat membuka peluang bagi sebuah negara untuk menyerang negara lain. Ketiga adalah sebuah negara tidak mengetahui apa-apa yang sudah direncanakan negara lain, intensitas interaksi negara satu dengan negara lainnya, hal ini menyebabkan kecurigaan antar negara. Keempat adalah tujuan utama dari semua negara yaitu untuk survival, semua negara ingin mempertahankan kedaulatannya. Kelima adalah negara harus berfikir strategis untuk bertahan dalam sistem internasional, karena negara merupakan aktor yang rasional, meski ada kemungkinan bagi negara melakukan kesalahan karena keterbatasan informasi (Mearsheimer, 1995).

Organisasi Internasional merupakan sebuah entitas antar pemerintahan dari beberapa negara yang kemudian dibentuk melalui sebuah perjanjian, organisasi internasional di bentuk agar mampu mengintegrasikan negara satu dengan negara lainnya untuk mencapai tujuan bersama, dimana tujuan bersama ini masih berkaitan dengan kepentingan nasional masing-masing negara anggotanya. Oleh karena itu, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang kemudian ditetapkan sebagai sebuah langkah-langkah atau cara-cara untuk memilih apakah dapat bekerjasama dan dapat bersaing satu negara dengan negara lainnya (Mearsheimer, 1995).

[Type here]

Dalam perspektif realisme terkait adanya suatu organisasi internasional tidak terlepas dari lima asumsi dasar realis terhadap sistem internasional. Hal ini menyimpulkan bahwa, meskipun organisasi internasional dibentuk oleh beberapa negara dan terdapat kesepakatan atau perjanjian di dalamnya, kekuasaan tertinggi tetaplah dimiliki oleh negara bukan pada organisasi internasional tersebut. Negara tetap menjadi aktor utama dalam hubungan internasional, dan tidak ada aktor lainnya selain negara yang memiliki otoritas dan legitimasi lebih besar dari negara itu sendiri. Perspektif realisme berpendapat bahwa hubungan internasional merupakan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan dan juga untuk bertahan hidup, negara akan selalu mementingkan kepentingan nasionalnya sebagai fokus utama karena dengan tercapainya kepentingan nasional negaranya maka kemampuan negara tersebut untuk mendapatkan kekuasaan dan bertahan hidup akan semakin besar (Mearsheimer, 1995).

Menurut perspektif realisme, organisasi internasional tidak akan mampu merealisasikan kerjasama antar negara dengan baik, karena adanya *relative gains considerations* dan *concern about cheating* dalam sistem kerjasama internasional (Mearsheimer, 1995). *Relative gains* yaitu negara berusaha untuk mencapai sebuah keuntungan namun dengan sedikit simpati kepada negara lain. Sedangkan *absolute gains* adalah negara akan berusaha memaksimalkan keuntungannya tanpa memedulikan bahwa itu akan memberikan kerugian kepada negara lain. Sementara *cheating* artinya negara melanggar perjanjian ataupun kesepakatan kerjasama yang telah disepakati di awal. Negara akan mempertimbangkan bahwa organisasi internasional akan menguntungkan bagi masing-masing negara atau

[Type here]

keuntungan yang didapat terdistribusi. Dalam pandangan realisme, negara akan memikirkan tentang keuntungan yang didapatkan didalam organisasi internasional tersebut, dan suatu negara memastikan bahwa keuntungan yang didapat lebih banyak atau tidak lebih buruk dibandingkan dengan organisasi lain (Mearsheimer, 1995).

Teori realisme yang ditulis oleh John J Mearsheimer dalam pandangannya terhadap sistem internasional, dapat digunakan oleh penulis dalam menjelaskan mengenai alasan Partai UKIP menolak keanggotaan Inggris di Uni Eropa dalam referendum Inggris, asumsi dasar pendekatan realisme terhadap sistem internasional ini memiliki kesamaan pandangan dengan Partai UKIP dalam melihat keanggotaan Inggris di Uni Eropa, sehingga dapat menjelaskan alasan Partai UKIP menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua asumsi yaitu, asumsi yang keempat terkait tujuan utama suatu negara yaitu untuk *survival*, dan asumsi kelima terkait negara harus berfikir strategis dalam sistem internasional.

Pada proses referendum ini, apakah Inggris akan bertahan atau keluar dari Uni Eropa, mayoritas partai politik di Inggris menginginkan agar Inggris tetap bertahan di Uni Eropa, akan tetapi Partai UKIP memiliki sikap yang berbeda dengan mendorong Inggris keluar dari Uni Eropa, Partai UKIP memiliki pertimbangan rasionalnya sendiri dalam memandang hubungan antara Inggris dan Uni Eropa, untuk mengkaji pertimbangan rasional dari Partai UKIP tersebut maka penulis akan mencoba menggunakan asumsi realis dari John J Mearsheimer dalam menguraikan alasan Partai UKIP mendorong Inggris keluar dari Uni Eropa.

[Type here]

Partai UKIP (*United Kingdom Independence Party*) sebagai partai nasionalis kanan di Inggris, melihat integrasi antara Inggris dan Uni Eropa menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada perspektif realisme dimana ada kesamaan asumsi antara perspektif realisme dan prinsip nasionalisme partai dalam memandang hubungan Inggris dan Uni Eropa. Selama masa keanggotaan Inggris di Uni Eropa, ada kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Uni Eropa seperti kebijakan uang kontribusi dan imigran dimana Inggris harus mengikuti kebijakan yang di putuskan Uni Eropa tersebut, hal ini menyebabkan Inggris tidak bisa menentukan sendiri kebijakannya karena terikat oleh kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Uni Eropa, sehingga kekuatan kedaulatan Inggris untuk menentukan kebijakannya terkait permasalahan tersebut mengalami penurunan akibat terikat oleh keanggotaan Uni Eropa.

Partai UKIP melihat fenomena tersebut menggunakan asumsi realis yang keempat dan kelima, sehingga menurut partai ini seharusnya Inggris berhak menentukan sendiri kebijakannya terkait uang kontribusi dan imigran karena otoritas tertinggi ada di tangan Inggris bukan Uni Eropa, selain itu transparansi proses pembuatan kebijakan di Uni Eropa juga harus mempertimbangkan kepentingan dari seluruh anggota termasuk Inggris. Partai UKIP terus mendorong pemerintahan Inggris untuk melakukan referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa dan menghendaki agar Inggris keluar dari Uni Eropa (Beritasatu, 2013).

Selama menjadi anggota Uni Eropa, salah satu kontributor keuangan terbesar Uni Eropa adalah Inggris, setiap tahunnya Inggris harus memberikan dana yang cukup besar kepada Uni Eropa, namun Partai UKIP memandang hal ini tidak

[Type here]

sebanding dengan apa yang didapatkan Inggris dari Uni Eropa, kerjasama dengan Uni Eropa tidak memberikan keuntungan yang cukup signifikan bagi Inggris, pandangan Partai UKIP ini sesuai dengan asumsi perpektif realis yang kelima, dimana suatu negara harus berfikir strategis untuk bertahan dalam sistem internasional, negara merupakan aktor rasional, artinya dalam mengambil keputusan suatu negara harus mempertimbangkan aspek keuntungan dan kerugiannya, ketika Uni Eropa tidak bisa memberikan keuntungan bagi Inggris, maka Partai UKIP memilih agar Inggris keluar dari Uni Eropa.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang masalah serta pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat di tarik kesimpulan sementara bahwasannya alasan Partai UKIP menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa dalam referendum Inggris 2016 adalah

1. Isu *Brexit* dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan suara Partai UKIP dalam pemilihan di Inggris.
2. Partai UKIP memiliki pertimbangan rasional bahwa bergabung dengan Uni Eropa akan merugikan Inggris.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguraikan dan menjelaskan alasan Partai UKIP menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa dalam referendum Inggris 2016

[Type here]

2. Untuk menjelaskan kepentingan Partai UKIP dalam menolak keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada referendum Inggris 2016 .

## **F. Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan tidak meluas serta melenceng dari kajian masalah serta judul yang ada dan mudah dimengerti maka penulis membatasi penelitian hanya berfokus pada kepemimpinan Partai UKIP pada masa Nigel Farage pada tahun 2009-2016, selain itu dalam penelitian ini membahas alasan penolakan Partai UKIP terhadap keanggotaan Inggris di Uni Eropa dalam referendum Inggris 2016, dalam memberikan pandangannya terhadap keanggotaan Inggris di Uni Eropa oleh Partai UKIP, penulis menganalisa menggunakan asumsi-asumsi dari perspektif realis, kemudian penulis menggunakan model pilihan rasional dan model ideologi dominan yang ada pada Teori Voting Behavior untuk menjelaskan kepentingan Partai UKIP dalam menolak keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada referendum Inggris 2016.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metodologi Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode analisa kualitatif dimana dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai alasan Partai UKIP menginginkan agar Inggris keluar dari Uni Eropa dalam referendum Inggris 2016.

### **2. Jenis Data**

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, web site, artikel dan media elektronik dan media cetak. Data

[Type here]

tentang Partai UKIP, Kebijakan Uni Eropa, dan Referendum Inggris 2016 didapat dari beberapa buku, jurnal, dan Internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu, juga mengunjungi beberapa situs di internet untuk melengkapi data yang penulis perlukan.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui dan memperjelas dalam mengetahui garis besar penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyajikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut,

Pada BAB I, akan berisi mengenai, pendahuluan, sehingga dalam bab ini akan memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam penyusunan skripsi yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II akan menjelaskan tentang profil dan perkembangan Partai UKIP di Inggris, mulai dari sejarah berdirinya partai tersebut, profil Partai UKIP terkait ideologi dan kebijakan, hingga perkembangan Partai UKIP dalam perpolitikan di Inggris.

Pada BAB III, dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai dinamika hubungan Inggris dengan Uni Eropa. Sejarah bergabungnya Inggris dengan Uni

[Type here]

Eropa, sistem perpolitikan di Inggris kemudian permasalahan imigrasi di Inggris dan Uni Eropa hingga referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

Pada BAB IV ini, yang akan dijelaskan oleh penulis berisikan tentang alasan Partai UKIP menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa dalam referendum Inggris 2016.

Pada BAB V ini berisikan penutup dan kesimpulan maupun ringkasan singkat yang telah disusun dalam bab – bab sebelumnya dan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini